
VILLAGE GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE USING VALUE FOR MONEY ANALYSIS

By

Agoes Hari Edy Wibowo¹, Fitriani², Evi Safitriani³

^{1,2,3} Prodi Manajemen, STIE Latifah Mubarokiyah

Email: ¹agusheri1961@gmail.com, ²fitrianiidarajat88@gmail.com, ³evisafit@gmail.com

Article History:

Received: 02-06-2023

Revised: 12-06-2023

Accepted: 05-07-2023

Keywords:

Performance, Value for Money, Economic Measurement, Efficiency, and Effectiveness

Abstract: *The public sector is an important aspect of governance in dealing with economy in the future. Including the smallest category of village accounting as a public sector application that also needs to be considered. The public sector has demands to carry out of accountability of public funds. In assessing the performance of village governance through the village revenue and expenditure budget, it can become a village overview to realize good governance. Performance appraisal uses the measurement of value for money, the authors emphasize the measurement of the economy, efficiency and effectiveness. The purpose of this study was to determine the application of value for money measurement in APBDes in assessing the financial performance of the village governments (case study in Bojongaok Village Jamanis Sub District of Tasikmalaya District). The method used is descriptive quantitative. From the results of the study using the measurement of value for money, it can be concluded that the financial performance of the village government has not been optimal and keep trying to improved its performance. Judging from the average In terms of economy for three years from 2019-2021 it is in the economic category. In terms of efficiency from years 2019-2021 is efficient. In terms of effectiveness from years 2019-2021 are quite effective.*

PENDAHULUAN

Menurut Yuesti,anik (2020:8) "Istilah "sektor publik" memiliki pengertian yang bermacam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik". Penggerak sektor publik adalah organisasi sektor publik, yang memiliki arti organisasi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh organisasi sektor publik adalah Pemerintahan Desa. Dalam Pemerintahan Desa, terdapat aspek keuangan yang perlu diperhatikan, agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa “adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan informasi yang laporan keuangan selama satu periode atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, seperti desa Bojonggaok”. Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penilaian kinerja pemerintahan desa bisa melalui Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena dalam laporan realisasi APBDes bisa kita lihat sejauh mana pemerintahan desa bisa mengatur keuangan desa. Dalam mengatur keuangan desa, mampu memberikan informasi yang menyeluruh atas kegiatan-kegiatan yang di danaikan oleh pemerintah pusat secara transparan.

Menurut Mardiasmo (2018:5) “*value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan berdasar pada tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah perbandingan input dengan output dalam satuan nilai rupiah. Efisiensi adalah perbandingan output dengan input berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran)”. Dengan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang telah berjalan sesuai sistem kinerja organisasi dan berpusat pada tujuan yang jelas, maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah yang dan didukung dengan perkembangan kualitas sumber daya yang ada. *Value for money* dalam suatu organisasi dapat tercapai apabila dalam penggunaan biaya masukan (*input*) paling kecil untuk mencapai suatu keluaran (*output*) yang optimum dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tertentu. Pengelolaan semacam ini berorientasi pada kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan, keputusan, rencana, dalam pelaksanaan program-program yang telah ditentukan. *Value for money* diharapkan mampu melakukan evaluasi kinerja yang baik berkaitan dengan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap tahunnya. Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojonggaok Tahun Anggaran 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Bojonggaok Tahun Anggaran (2019-2021)

Tahun	Pendapatan		%	Selisih
	Anggaran	Realisasi		
2019	Rp. 1.733.196.178	Rp. 1.635.004.673	94,33%	
2020	Rp. 2.162.667.000	Rp. 2.164.209.918	100,07%	Naik 5,74%
2021	Rp. 1.826.151.582	Rp. 1.827.041.583	100,05%	Turun 0,02%
Rata-rata			98,15%	

Sumber : Pemerintahan Desa Bojonggaok, diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 bahwa anggaran pendapatan pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 1.733.196.178 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.635.004.673 sehingga presentase antara anggaran dan realisasi pendapatan 94,33%. Kemudian pada tahun 2020 terdapat peningkatan anggaran menjadi Rp. 2.162.667.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.164.209.918 hal tersebut menjadikan hasil presentasi berjumlah 100,07% naik 5,74% dari tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya wabah *virus covid-19* yang beredar dimasyarakat yang menjadikan Pemerintahan Desa Bojonggaok harus siap siaga menyediakan dana guna membantu kehidupan masyarakat. Kemudian, pada tahun 2021 terdapat penurunan anggaran pendapatan menjadi Rp. 1.826.151.582 serta realisasi pendapatan pun menurun menjadi Rp. 1.827.041.583 dan presentase antara anggaran dan realisasi anggaran 100,05% turun 0,02% dari tahun 2020. Pada tahun 2021 terdapat penurunan pendapatan dikarenakan tidak ada bantuan dari Kabupaten.

Tabel 2

Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Bojonggaok Tahun Anggaran (2019-2021)

Tahun	Belanja		%	Selisih
	Anggaran	Realisasi		
2019	Rp. 1.661.494.322	Rp. 1.559.570.364	93,86%	
2020	Rp. 2.166.399.398	Rp. 2.166.766.263	100,02%	Naik 6,16%
2021	Rp. 1.718.804.735	Rp. 1.715.782.312	99,82%	Turun 0,2%
Rata-rata			97,90%	

Sumber : Pemerintahan Desa Bojonggaok diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 bahwa dari tahun 2019-2021 anggaran belanja serta realisasi belanja Pemerintahan Desa Bojonggaok mengalami fluktuasi. Presentase terbesar berada pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 masyarakat Desa Bojonggaok sedang terjangkit *virus Covid-19* maka dari itu, Pemerintah Desa Bojonggaok menganggarkan serta merealisasikan belanja lebih besar dari tahun 2019. Pada tahun 2021 terdapat penurunan angka anggaran serta realisasi belanja Pemerintah Desa Bojonggaok karena Pada tahun 2021 terdapat penurunan jumlah warga yang terdampak wabah *virus Covid-19*.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa realisasi pendapatan serta belanja Desa mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2021. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bojonggaok dengan judul : "Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Dengan Analisis Value For Money (Studi Kasus Pada Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019-2021)".

LANDASAN TEORI

Value For Money Menurut Mahmudi (2015:83) "*Value for money* (VFM) merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Konsep value for money terdiri atas tiga elemen utama, yaitu ekonomi, Efisiensi serta efektivitas". Berdasarkan pengertian tersebut, Mahmudi (2015:83) menjelaskan tentang pengertian ketiga komponen tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

a. Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder yang berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi yang dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi pemborosan. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut, dengan rumus:

$$Ekonomi = \frac{Input}{Input\ Value\ Rp} \times 100\%$$

b. Efisiensi merupakan komponen yang berkaitan dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (Spending well). Adapun elemen efisiensi diukur dengan membandingkan output dengan input yang kemudian dihubungkan dengan target yang sudah ditentukan (Mardiasmo, 2018:5), dengan rumus sebagai berikut:

$$Efisien = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

c. Efektivitas merupakan hubungan antara. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Mardiasmo (2017:134) mendefinisikan efektivitas sebagai tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan suatu kejayaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan dengan efektif, dengan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, berikut adalah keterangan perhitungan rasio ekonomi, efisiensi serta efektivitas menurut Imanuel, David dan Steven (2020:781-788):

Keterangan Perhitungan Ekonomi:

- Input : Target Anggaran Belanja Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
 Input Value : Realisasi Anggaran Belanja Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

Keterangan Perhitungan Efisiensi:

- Output : Realisasi Anggaran Belanja Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
 Input : Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

Keterangan Perhitungan Efektivitas:

- Outcome : Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

Output : Target Anggaran Pendapatan Pemerintahan Desa Bojonggaok Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

Dapat dilihat pada keterangan diatas bahwa terdapat perbedaan antara penjelasan input dan output pada setiap perhitungan, hal tersebut dikarenakan disesuaikan dengan penjelasan dan tujuan perhitungan tersebut.

Menganalisa presentase hasil pengukuran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan kriteria-kriteria segi ekonomi,efisiensi dan efektivitas untuk dapat menilai kinerja keuangan, kemudian ditarik kesimpulan.

Dari segi ekonomi :

- a. Apabila hasil perbandingan menunjukkan lebih besar dari 100%, maka APBDes dikatakan ekonomis.
- b. Apabila hasil yang dicapai antara 85%-100%, maka APBDes dikatakan cukup ekonomis.
- c. Apabila hasil yang dicapai antara 65%-84%, maka APBDes dikatakan kurang ekonomis.
- d. Apabila hasil yang dicapai kurang dari 65%, maka APBDes dikatakan tidak ekonomis.

Dari segi efisiensi :

- a. Apabila hasil perbandingan menunjukkan kurang dari 90% maka APBDes dikatakan sangat efisien.
- b. Apabila hasil yang dicapai antara 90%-99%, maka APBDes dikatakan efisien.
- c. Apabila hasil yang dicapai tepat 100%, maka APBDes dikatakan cukup efisien.
- d. Apabila hasil yang dicapai lebih dari 100%, maka APBDes dikatakan tidak efisien.

Dari segi efektivitas :

- a. Apabila hasil perbandingan lebih besar atau sama dengan 100%, maka APBDes dikatakan efektif.
- b. Apabila hasil yang dicapai antara 85%-99%, maka APBDes dikatakan cukup efektif.
- c. Apabila hasil yang dicapai antara 65%-84%, maka APBDes dikatakan kurang efektif.
- d. Apabila hasil yang dicapai lebih kecil atau sama dengan 65%,maka APBDes dikatakan tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah APBDes Desa Bojonggaok pada tahun 2019 – 2021. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh APBDes Desa Bojonggaok sedangkan sampel yang diambil pada tahun 2019 – 2021. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis *Value for Money*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan penelitian ini, laporan keuangan yang digunakan untuk menganalisis *Value For Money* yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa Bojonggaok Tahun Anggaran 2019 – 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Bojonggaok
Tahun Anggaran 2019-2021

No	Pendapatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Pendapatan Asli Desa	2019	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Rp. 0
		2020	Rp. 3.624.000	Rp. 3.624.000	Rp. 0
		2021	Rp. 6.857.600	Rp. 6.857.600	Rp. 0
2	Pendapatan Trasfer	2019	Rp. 1.731.796.178	Rp. 1.631.796.186	Rp. 99.999.992
		2020	Rp. 2.159.043.000	Rp. 2.159.043.000	Rp. 0
		2021	Rp. 1.809.236.000	Rp. 1.809.236.000	Rp. 0
3	Pendapatan Lain-lain	2019	Rp. 0	Rp. 1.808.487	Rp. 1.808.487
		2020	Rp. 0	Rp. 1.542.918	Rp. 1.542.918
		2021	Rp. 10.057.982	Rp. 10.947.983	Rp. 890.001

Sumber : Pemerintahan Desa Bojonggaok (2022)

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Bojonggaok
Tahun Anggaran 2019-2021

No	Belanja	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2019	Rp. 550.095.022	Rp. 548.171.064	Rp. 1.923.958
		2020	Rp. 609.015.911	Rp. 609.391.263	Rp. 375.352
		2021	Rp. 809.984.653	Rp. 806.962.230	Rp. 3.022.423
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2019	Rp. 1.056.539.300	Rp. 956.539.300	Rp. 100.000.000
		2020	Rp. 682.513.000	Rp. 682.513.000	Rp. 0
		2021	Rp. 497.400.082	Rp. 497.400.082	Rp. 0
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2019	Rp. 36.960.000	Rp. 36.960.000	Rp. 0
		2020	Rp. 57.538.487	Rp. 57.530.000	Rp. 8.487
		2021	Rp. 29.390.000	Rp. 29.390.000	Rp. 0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2019	Rp. 17.900.000	Rp. 17.900.000	Rp. 0
		2020	Rp. 15.400.000	Rp. 15.400.000	Rp. 0
		2021	Rp. 11.750.000	Rp. 11.750.000	Rp. 0
5	Bidang Tak Terduga	2019	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
		2020	Rp. 801.932.000	Rp. 801.932.000	Rp. 0
		2021	Rp. 370.280.000	Rp. 370.280.000	Rp. 0

Sumber : Pemerintahan Desa Bojonggaok (2022)

1. Pengukuran Ekonomi

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 5
Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Hasil Presentase (%)	Selisih
2019	Rp. 1.661.494.322	Rp.1.559.570.364	106,54%	
2020	Rp.2.166.399.398	Rp.2.166.766.263	99,99%	Turun 6,55%
2021	Rp.1.718.804.735	Rp.1.715.782.312	100,18%	Naik 0,19%
Rata-rata			102,23%	

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomi diatas menunjukkan angka pada rata-rata lebih dari 100% sehingga masuk pada kategori ekonomis. Meskipun, pada tahun 2020 memiliki kategori cukup ekonomis, hal tersebut dikarenakan realisasi belanja melebihi angka anggaran belanja karena pada tahun tersebut Desa Bojonggaok sedang meningkatnya masyarakat yang terjangkit virus Covid-19 jadi Pemerintah Desa Bojonggaok memfokuskan pembiayaan untuk membantu masyarakat di era Covid-19 saat itu. Meskipun begitu, Desa Bojonggaok dikategorikan cukup ekonomis karna angka realisasi dan anggaran belanja tahun 2020 tidak begitu jauh dan bisa dikatakan mampu mengatasi keadaan darurat tanpa melakukan pemborosan yang berlebihan. Sedangkan pada tahun 2019 Virus Covid-19 belum begitu menyebar dimasyarakat Desa Bojonggaok sehingga pembiayaan tidak begitu melonjak. Dan pada tahun 2021 keadaan masyarakat sudah membaik dan Virus Covid-19 mulai berangsur teratasi maka ekonomi pun stabil kembali.

2. Pengukuran Efisiensi

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel 6
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Hasil Presentase (%)	Selisih
2019	Rp.1.559.570.364	Rp.1.635.004.673	95,39%	
2020	Rp.2.166.766.263	Rp.2.164.209.918	100,12%	Naik 4,73%
2021	Rp.1.715.782.312	Rp.1.827.041.583	93,91%	Turun 6,21%
Rata-rata			96,47%	

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi diatas menunjukkan angka pada rata-rata 96,47% yang dikategorikan efisien. Meskipun pada tahun 2020 dikategorikan tidak efisien, ditahun 2019 dan 2021 dikategorikan efisien. Pada tahun 2020 mengalami tidak efisien karena realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan, perbedaannya menembus angka Rp. 2.556.345.

Efisiensi dikaitkan dengan konsep produktivitas, efisiensi dalam organisasi dapat dicapai apabila program yang menjadi tujuan diwujudkan dengan sumber daya dan

dana yang serendah mungkin. Namun, jika kita tinjau kembali pada visi Desa Bojonggaok yaitu “Terwujudnya Bojonggaok sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram). Maka, jika dilihat dalam keadaan darurat Desa Bojonggaok mampu mensejahterakan masyarakat meskipun dana yang digunakan melebihi pendapatan yang diterima Desa Bojonggaok

3. Pengukuran Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 7

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Hasil Presentase (%)	Selisih
2019	Rp.1.635.004.673	Rp.1.733.196.178	94,33%	
2020	Rp.2.164.209.918	Rp.2.162.667.000	100,07%	Naik 5,74%
2021	Rp.1.827.041.583	Rp.1.826.151.582	100,04%	Turun 0,03%
Rata-rata			98,15%	

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas diatas menunjukkan angka pada rata-rata 98,15% dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2019 Desa Bojonggaok dikategorikan cukup efektif karena nilai realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran pendapatan. Pada tahun 2020 mencapai angka 100,07% dikategorikan efektif dan pada tahun 2021 juga dikategorikan efektif dengan angka pencapaian pengukuran sebesar 100,04%.

Tabel 8

Kriteria Pengukuran Value for money Berdasarkan Pada Rasio Ekonomi, Efisiensi Serta Efektivitas

No	Presentase Pengukuran	Kriteria
1.	Rasio Ekonomi	
	> 100%	Ekonomis
	85% sampai 100%	Cukup Ekonomis
	65% sampai 84%	Kurang Ekonomis
2.	Rasio Efisiensi	
	<90%	Sangat Efisien
	90%-99%	Efisien
	100%	Cukup Efisien
3.	Rasio Efektivitas	
	> 100%	Efektif
	85% sampai 100%	Cukup Efektif
	65% sampai 84%	Kurang Efektif
	<65%	Tidak Efektif

Sumber : Diolah Peneliti (2022) berdasarkan pengukuran Mahmudi (2015:111)

Tabel 9
Hasil Pengukuran *Value for money* Pada Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Bojonggaok Tahun Anggaran 2019-2021

Pengukuran <i>Value for money</i>	2019	2020	2021	Rata-rata
Ekonomi	106,54%	99,99%	100,18%	102,23%
Kriteria	Ekonomis	Cukup Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
Efisiensi	95,39%	100,12%	93,91%	96,47%
Kriteria	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Efisien
Efektivitas	94,33%	100,07%	100,04%	98,15%
Kriteria	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Cukup Efektif

Sumber : Diolah Peneliti (2022)

KESIMPULAN

1. Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Bojonggaok dari segi ekonomi selama tiga tahun anggaran dari tahun 2019-2022 berada pada kategori ekonomis karena rata-rata presentase pengukurannya lebih dari 100% dapat diartikan bahwa Pemerintahan Desa Bojonggaok pada tahun anggaran 2019-2021 mampu mengatur anggaran supaya tidak melakukan pemborosan hal tersebut tergambar pada realisasi belanja yang tidak jauh berbeda dengan anggaran belanja.
2. Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Bojonggaok dari segi efisiensi selama tiga tahun anggaran dari tahun 2019-2022 berada pada kategori efisien karena rata-rata presentase pengukurannya antara 90%-99%. Meskipun pada tahun 2020 dikatakan tidak efisien karena realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan hal tersebut dapat diwajarkan karena pada saat itu sedang melonjaknya Virus Covid-19 dimasyarakat Desa Bojonggaok jadi Pemerintahan Desa pun mengoptimalkan pembiayaan untuk masyarakat dalam menghadapi era pandemi saat itu. Pada tahun 2021 presentase pengukurannya masuk dalam kategori efisien. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Pemerintahan Desa Bojonggaok dapat bangkit kembali dan terus berusaha menghasilkan pelayanan tertentu dengan biaya serendah-rendahnya.
3. Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Bojonggaok dari segi efektivitas selama tiga tahun anggaran dari tahun 2019-2022 berada pada kategori cukup efektif karena rata-rata presentase pengukurannya masuk dalam presentase antara 85% sampai 100% hal tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan yang dihasilkan Pemerintahan Desa Bojonggaok cukup memenuhi tujuan yang diharapkan Desa untuk masyarakatnya.

Saran

1. Desa Bojonggaok harus mampu lagi mengatur anggaran supaya tidak melakukan pemborosan hal tersebut tergambar pada realisasi belanja yang tidak jauh berbeda dengan anggaran belanja.
2. Desa Bojonggaok harus mampu mengoptimalkan dana yang ada dan dapat bangkit dari keterpurukan perekonomian desa bojonggaok.
3. Desa bojonggaok harus lebih meningkatkan pelayanan dari segi efektivitas keuangan pemerintah desa

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A Siregar, Fachrul dan Fazli Syam BZ. 2017. Analisis Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2, No. 4. Halaman 93-106.
- [2] Fahmi, Irham. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- [3] Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM
- [4] Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [5] Mardiasmo. 2018, *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- [6] Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Indonesia
- [7] Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [8] Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [9] Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [10] Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- [11] Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing.
- [12] R. A. Polli, Immanuel, David dan Steven. 2020. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep *Value for money*. *Jurnal EMBA*. Vol.8 No.4. Halaman 781 -788.
- [13] Resa Anggia Sakti, Rasmus. 2021. Measurement Of Financial Performance Using The Concept Of *Value for money* In The Government Of Bandung City. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*. Vol. 5 No.1. Halaman 113-122. DOI;10.36555.
- [14] S. B Seran I, Marisa. 2021. *Value for money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol 4 No. 1. Halaman 94-101.
- [15] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [16] Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, hal.16.
- [17] Yuesti, Ni dan I Gusti. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: CV. Noah Aletheia